



Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

Perkokoh Peran dan Kontribusi BUMD Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkokoh peran dan kontribusi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi kesejahteraan warga dan pembangunan wilayah Jakarta. Konsistensi pencegahan korupsi pun menjadi penopang utama seiring pengawasan oleh DPRD dan masyarakat Ibu Kota.

an kerja sehingga menyerap tenaga kerja, memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta, memefektifkan dana pembiayaan daerah, dan membantu meningkatkan produktivitas daerah dan nasional serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, tata ruang, transportasi, pangan, dan lingkungan hidup.

Peran dan kontribusi BUMD DKI Jakarta bagi warga dan pembangunan wilayah Jakarta tentu sangat dihapit. Musababnya, BUMD merupakan badan usaha yang mempunyai keunikan tersendiri dan memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya.

"Kehadiran BUMD memiliki peranan penting dan strategis dalam membantu mewujudkan program kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah karena memiliki keterbatasan sumber daya manusia, baik kapasitas, kompetensi, maupun pengalaman hingga keterbatasan waktu dan fleksibilitas keuangan," beber Budi.

Bagi Pemprov DKI Jakarta, peran dan fungsi BUMD tidak hanya melaksanakan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau mencari ke-

penjaminan keuangan, menyediakan sarana rekreasi yang terjangkau serta pusat kesenian dan kebudayaan, menyediakan kawasan industri untuk melakukan usaha, maupun mendukung aktivitas UMKM.

"BUMD mendukung ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, menjaga inflasi daerah melalui ketahanan pangan, dan penyediaan pasar rakyat. Di samping itu, BUMD juga telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen dan pajak," ujar Budi.

manfaat bagi warga. "Kemudian tidak boleh ada stratifikasi layanan kepada masyarakat seperti ini, tapi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jadi begini. Kan itu tidak bagus," ungkapnya.

Berikutnya, pengawasan oleh DPRD DKI Jakarta terhadap tata lola maupun penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan termasuk penyertaan modal daerah (PMD) di BUMD-BUMD harus ditingkatkan dan terus-menerus dilakukan. Pasalnya selama ini, KPK melihat seakan-akan pihak DPRD kurang melakukan pengawasan.

"Masyarakat Jakarta juga mesti aware, memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi bahwa BUMD-BUMD di Jakarta milik mereka juga, saham-saham di BUMD-BUMD Jakarta milik mereka juga. Maka kami berharap warga Jakarta juga turut mengawasi BUMD-BUMD," tegas Ghufron.

Ghufron mengungkapkan, dalam konteks korupsi di lingkungan BUMD Jakarta, saat ini KPK telah menangani perkara terpidana mantan direktur utama Perusahaan Umum Daerah (Perumd) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dkk. Perkara Yoory dkk adalah korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranjung, Jakarta Timur 2019 dalam rangka proyek pembangunan hunian *down payment* (DP) Rp0 yang merugikan negara lebih Rp152,565 miliar. Pembelian tanah tersebut di antaranya menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) DKI Jakarta yang sebelumnya dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1,803 triliun.

Dalam proses pengadaan dan pembelian tanah tersebut terjadi kongkalibong antara pejabat Perumd Pembangunan Sarana Jaya dalam hal ini terpidana Yoory dengan makelar, dan *beneficial owner* PT Adonara Proptendo Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar, dan pihak lain. Harga tanah di-mark up, ada luasan atau area tanah yang belum clear secara hukum atau masih bersengketa dan dihangak secara tidak wajar sehingga keuntungannya dibagi-bagi. "Untuk itu menurut saya, dengan kasus tanah di Munjul ini, perlu pengawasan yang lebih bagus, yang lebih ketat agar tidak berulang lagi kasus korupsi di BUMD-BUMD DKI Jakarta," tandas Ghufron.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyatakan diperkuatnya peran dan kontribusi BUMD akan berimbas positif bagi masyarakat dan pelayanan publik di wilayah Jakarta. "Kan ada BUMD yang sifatnya *business oriented*, tapi ada juga yang sifatnya pelayanan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi BUMD di Jakarta ini harus diperkuat dan lebih ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Suhaimi saat dihubungi KORAN SINDO di Bandung, Selasa (17/5).

Dalam konteks *business oriented*, kata Suhaimi, tentu saja akan berimbas pada dividen maupun pajak yang nantinya masuk sebagai PAD. Oleh karena itu manajemen, struktur, dan tata kelola seluruh BUMD haruslah diperkuat serta dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan. "Kemudian untuk PMD, penyertaan modal daerah, yang diukurkan oleh Pemprov DKI dan diterima BUMD itu harus dimanfaatkan dengan maksimal. Dan sebenarnya, kalau bisa tidak perlu PMD. Dengan mengembangkan kerja sama, saya kira itu kan jauh lebih baik," tandas Suhaimi.

▣ **saibir laluhu**

Berdasarkan buku "Statistik Keuangan BUMD dan BUMD 2020" yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 7 Desember 2021, tercatat ada 15 BUMD di DKI Jakarta sepanjang 2017-2020. Seluruh BUMD ini memiliki total aset sebesar lebih Rp90,288 triliun (T) pada 2020, lebih tinggi dari 2017 (lebih Rp74,275 T). BPS juga memastikan, 15 BUMD di DKI Jakarta memiliki pendapatan sebesar lebih Rp11,250 T dengan laba bersih lebih Rp1,776 T pada 2017. Meskipun pendapatan meningkat menjadi lebih Rp14,517 T pada 2020, laba bersih turun di angka lebih Rp1,382 T.

Pt Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD Provinsi DKI Jakarta Budi Purnama mengungkapkan, dalam sistem informasi BUMD tercatat Pemprov memiliki 13 BUMD dan 10 perusahaan patungan dengan total aset senilai Rp119,25 T pada 2017 dan senilai Rp159,46 T pada 2020. Terkait dengan pendapatan usaha, BUMD DKI Jakarta dan perusahaan patungan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp25,63 T pada 2017 dan senilai Rp29,64 T pada 2020. Berikutnya, laba bersih pada 2017 senilai Rp3,91 T dan pada 2020 senilai Rp1,75 T. Pemprov juga mencatat bahwa terdapat 14 perusahaan yang menyuntikkan dividen sebesar Rp672,49 miliar atau setara dengan 0,99 % dari total APBD DKI Jakarta pada 2020.

"Ada tiga perusahaan penyector dividen terbesar pada 2020, disumbangkan oleh PT Bank DKI sejumlah lebih Rp285,95 miliar, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) senilai lebih Rp154,38 miliar (yang merupakan penyectoran dividen untuk dua tahun buku, yaitu 2018 dan 2019), dan PT Delta Djakarta Tbk senilai lebih Rp81,97 miliar," ujar Budi kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Hingga April 2022, kata Budi, Pemprov DKI Jakarta memiliki 23 perusahaan, terdiri atas 13 BUMD (kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta lebih dari 51 %) dan 10 perusahaan patungan (kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta kurang dari 51%). Total jumlah dividen yang dibagikan oleh BUMD dan perusahaan patungan selama kurun 2020 hingga April 2022 sebesar

Rp1.291.536.426.883. Perinciannya Rp672.491.534.639 pada 2020, Rp398.792.009.852 pada 2021, dan Rp220.252.882.392 sepanjang Januari sampai dengan April 2022. "Pada 2022 masih terdapat beberapa BUMD dan PT (perusahaan) patungan yang belum melaksanakan RUPS tahunan atau pengesahan laporan tahunan untuk menetapkan besaran dividen yang akan diberikan kepada pemilik modal/sahamnya atas kerja tahun buku 2021 yang diotorisasi pada 2022," kata dia.

Dia menambahkan, ada total Rp10,11 T penyertaan modal daerah (PMD) yang diukurkan Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah BUMD. Pada 2020, masing-masing Rp4,21 T untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumd) AM Jaya, Perumd Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Tourindo, PT Jakarta Proptendo (Perseroda Pembangunan), PT MRT Jakarta (Perseroda), Perumd PAL Jaya, dan Perumd Pasar Jaya). Berikutnya pada 2021, Rp5,90

triliun untuk Perumd AM Jaya, Perumd Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Tourindo, PT Jakarta Proptendo (Perseroda), dan PT MRT Jakarta (Perseroda).

PMD itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). PMD dimanfaatkan sesuai dengan usulan investasi BUMD yang disetujui oleh DPRD dan Gubernur. Investasi yang di-danai dengan PMD adalah proyek-prek proyek-strategis daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta, antara lain pangan, air bersih, transportasi, olahraga dan seni budaya serta perumahan. "Pertanggungjawaban penggunaan dana PMD dilakukan oleh BUMD dengan membukukan laporan keuangannya secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu BUMD secara periodik triwulanan dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, memberikan laporan kepada Gubernur tentang penggunaan

dana PMD serta progres proyek yang didanai dari PMD," ungkapnya.

Manfaat Besar bagi Warga Ibu Kota

Melihat fungsinya, BUMD Jakarta didirikan dengan tujuan untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ada beberapa peran BUMD dan kontribusi-nya bagi warga dan pembangunan DKI Jakarta sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Antara lain meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta sebagai salah satu sumber pendapatan APBD DKI Jakarta, membuka lapang-



untungannya konsisten mewujudkan pencegahan korupsi dengan memiliki peraturan dan melaksanakan *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Harus juga menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016, melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang dan ketat, hingga memperkuat integritas pejabat/pegawai BUMD.

"Pemprov DKI dan seluruh BUMD harus benar-benar menepati celah-celah penyimpangan, pelanggaran hukum, pelanggaran administratif, dan peluang terjadinya berbagai bentuk korupsi yang berujung kerugian keuangan BUMD dan/atau daerah. Pencegahan korupsi harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Selain itu, perlu pengawasan yang lebih bagus dan ketat, entah oleh komisiaris BUMD atau ada satuan pengawasan internal (SPI) yang lebih ketat di BUMD-BUMD DKI Jakarta itu," ujar Ghufron saat ditemui KORAN SINDO, di Lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu menutarikan, pengawasan secara ketat baik oleh komisiaris maupun SPI BUMD sangatlah penting. Musababnya, jika komisiaris maupun SPI ikut terlibat melakukan penyuongkolan atau pelanggaran atau penyalahgunaan, hal itu akan berimbas pada BUMD, daerah, dan masyarakat. Apalagi tugas atau fungsi BUMD adalah menghasilkan profit (keuntungan) untuk disumbangkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan layanan terbaik dan